



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. BANGKALAN

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Rintisan <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>.	1. Informasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Terkelola <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.	2. Interaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Terstandar-disasi <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.	3. Transaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Terintegrasi dan Terukur <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.	4. Kolaborasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimum <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.	5. Optimalisasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

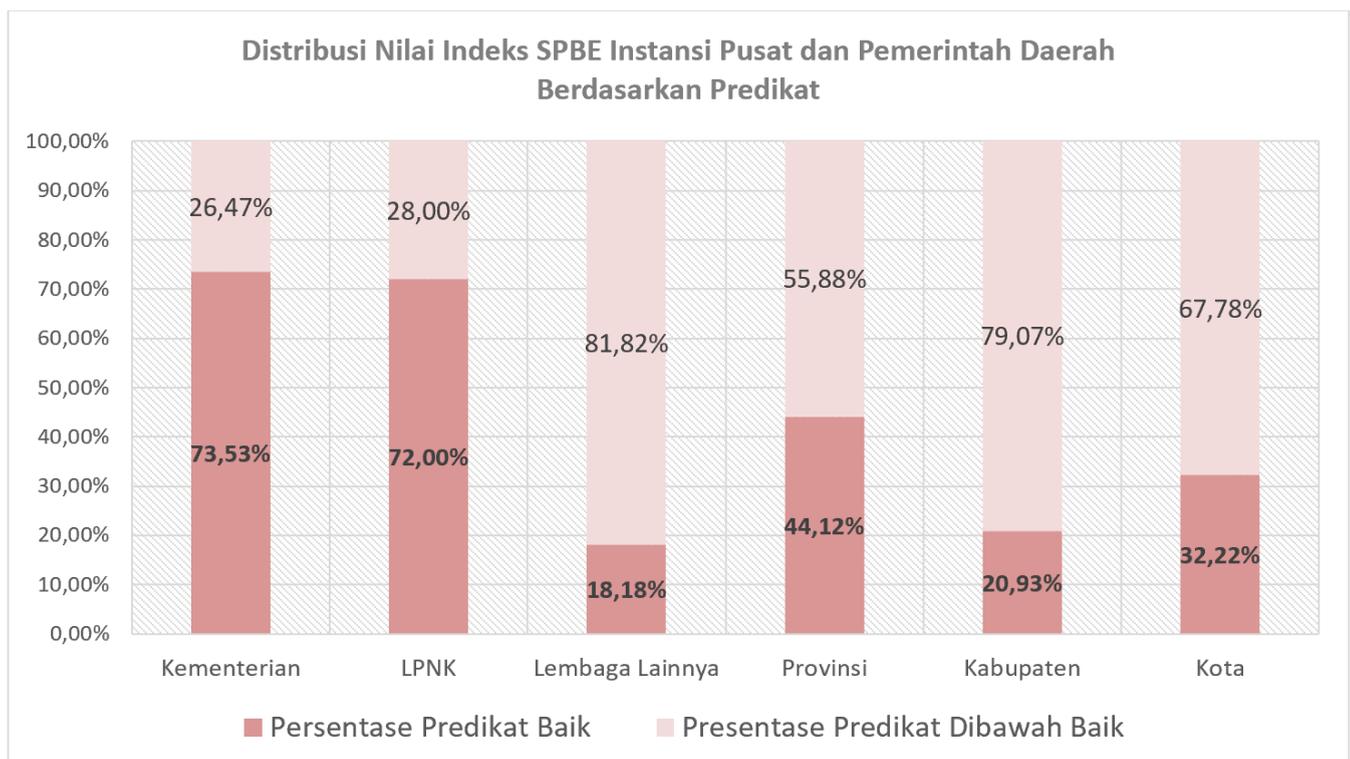
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks	Nilai
		SPBE
	Domain Kebijakan SPBE	2,50
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,50
	Domain Tata Kelola SPBE	1,00
	Perencanaan Strategis SPBE	1,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
	Penyelenggara SPBE	1,00
	Domain Manajemen SPBE	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	1,93
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,10
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,67

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator yang sudah terpenuhi untuk aspek Kebijakan Internal adalah: indikator 1, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10.

- **Kekuatan**
Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola, Kabupaten ini tidak menunjukkan adanya kekuatan.
- **Kelemahan**
Pada aspek Kebijakan ini, indikator yang masih lemah dijumpai pada indikator 2, 5, serta manajemen keamanan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Pada aspek ini, Kabupaten Bangkalan belum memiliki indikator yang memenuhi.

- **Kekuatan**
Indikator pada aspek ini yang merupakan kekuatan tidak ada.
- **Kelemahan**
Semua indikator pada aspek merupakan kelemahan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada aspek TIK, tidak ditemui indikator yang memenuhi aspek pada Kabupaten Bangkalan.

- **Kekuatan**
Pada aspek ini, juga tidak ditemui indikator yang merupakan kekuatan.
- **Kelemahan**
Semua indikator pada aspek ini merupakan kelemahan dimana dokumen pendukung tidak ada.

D. Penyelenggara SPBE

Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum menunjukkan adanya indikator yang memenuhi aspek

Penyelenggaraan SPBE.

- Kekuatan
Pada aspek ini, indikator yang merupakan kekuatan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih belum ada.
- Kelemahan
Semua indikator pada aspek ini merupakan kelemahan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, belum ada indikator yang memenuhi aspek ini.

- Kekuatan
Indikator yang merupakan kekuatan juga belum ada pada aspek ini.
- Kelemahan
Semua indikator pada aspek Penerapan Manajemen SPBE merupakan kelemahan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki rencana manajemen SPBE.

F. Audit TIK

Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki indikator yang memenuhi aspek Audit TIK.

- Kekuatan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki indikator yang merupakan kekuatan pada aspek Audit TIK.
- Kelemahan
Semua indikator untuk aspek Audit TIK masih merupakan kelemahan. Data dukung untuk indikator ini tidak diberikan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada aspek ini, indikator yang sudah memenuhi adalah layanan Perencanaan yang berbasis elektronik.

- Kekuatan
Sementara itu, indikator yang merupakan kekuatan pada aspek ini adalah Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung layanan tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
- Kelemahan
Pada aspek ini, indikator-indikator yang merupakan kelemahan adalah Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan, arang Milik Negara, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Layanan Kinerja Pegawai. Data dukung untuk indikator-indikator ini tidak menunjukkan kapabilitas aplikasi tersebut, apakah aplikasi memiliki fitur untuk interaksi, transaksi, atau terintegrasi dengan aplikasi lain. Data dukung yang ada hanyalah tampilan login saja.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki indikator yang memenuhi aspek ini.

- Kekuatan
Indikator yang merupakan kekuatan aspek ini juga masih belum ada.
- Kelemahan
Semua indikator yang ada pada aspek ini merupakan kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Data dukung yang diberikan untuk aspek ini hanya menunjukkan halaman login, atau fitur untuk pencarian. Data dukung tidak menunjukkan fitur untuk transaksi atau integrasi dengan aplikasi lain,

Rekomendasi

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Bangkalan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Bangkalan, sudah dapat menggambarkan predikat Kurang (1.62) dalam penerapan SPBE. Semua aspek, baik Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE masih lemah. Namun demikian, jika dilihat per indikator Kabupaten ini terdapat indikator yang sudah terpenuhi, misalnya pada aspek Kebijakan terdapat Kebijakan internal terkait arsitektur SPBE, Manajemen Data, Pengembangan Aplikasi, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan. Pada aspek Layanan, indikator yang sudah terpenuhi, dan bahkan unggul adalah indikator aplikasi layanan umum berbagi pakai untuk administrasi.

Keunggulan

Dari keempat aspek, secara umum keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan masih belum ada. Namun jika dilihat per indikator, beberapa indikator dalam Layanan Administrasi sudah terpenuhi bahkan unggul. Hal ini dikarenakan Layanan Administrasi tersebut merupakan Layanan Berbagi Pakai, yang merupakan Aplikasi nasional, misalnya aplikasi untuk layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang.

Kelemahan

Semua aspek SPBE Kabupaten Bangkalan merupakan kelemahan. Score untuk aspek Kebijakan masih di bawah 2.6. Kelemahan aspek Kebijakan bisa ditunjukkan oleh belum ada Kebijakan Peta Rencana SPBE dan Pusat Data, serta kebijakan Manajemen Keamanan.

Aspek Tata kelola juga merupakan kelemahan dalam penerapan SPBE. Perencanaan strategis SPBE kabupaten ini Rencana Induk SPBE masih belum ditetapkan. Implementasi TIK masih belum didukung oleh data dukung yang memadai.

Apresiasi/Saran Perbaikan Kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sudah memiliki Perbup 24/2021 tentang SPBE, namun peraturan tersebut masih belum mengatur Peta Rencana SPBE. Demikian juga untuk Kebijakan Pusat Data, Peraturan tersebut masih belum mengatur Pusat Data. Kebijakan Manajemen Keamanan masih belum secara lengkap diatur dalam Peraturan tersebut. Oleh karena Kabupaten Bangkalan perlu menyesuaikan lagi Peraturan tersebut dengan kebutuhan implementasi SPBE di Kabupaten tersebut.

Perencanaan Strategis

Lemahnya aspek Perencanaan Strategis SPBE disebabkan karena dokumen Rencana Induk SPBE masih belum ditetapkan. Oleh karena Kabupaten untuk dapat segera menetapkan Rencana Induk SPBE dengan memperhatikan acuan arsitektur SPBE nasional.

TIK

Rendahnya nilai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bangkalan ditunjukkan oleh perencanaan pembangunan aplikasi tidak selaras dengan Peta Rencana SPBE, dan beberapa indikator tidak diberikan data dukung. Oleh karena itu, Kabupaten Bangkalan dalam mengimplementasikan TIK perlu direncanakan dan tidak bersifat adhoc.

Penyelenggara SPBE

Tim Koordinasi SPBE perlu menyusun Rencana Kerjanya dan melaksanakan Rencana Kerja tersebut. Data dukung untuk penyelenggaraan SPBE masih belum memadai.

Penerapan Manajemen SPBE

Pada aspek Manajemen SPBE, Kabupaten Bangkalan perlu merencanakan manajemen SPBE yang meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen SDM TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan TIK, dan manajemen layanan SPBE. Panduan untuk melakukan manajemen SPBE perlu dibuat.

Audit TIK

Kabupaten Bangkalan juga perlu merencanakan Audit TIK dan melaksanakan kegiatan audit TIK yang terdiri atas audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan. Ada baiknya Kabuapten ini memiliki tim yang memiliki kompetensi audit TIK, dan kemudian ditetapkan oleh Tim Koordinator SPBE Kabupaten Bangkalan.

Layanan Administrasi

Aplikasi layanan administrasi Kabupaten Bangkalan didasarkan atas tidak memadai data dukung yang diberikan. Data dukung yang ada tidak menunjukkan kapasitas aplikasi tersebut fitur aplikasi mendukung interaktif, atau transaksi. Data dukung hanya menunjukkan tampilan login saja.

Layanan Publik

Begitu juga aplikasi yang digunakan untuk mendukung layanan publik tidak memiliki data dukung yang memadai. Untuk itu, selain dokumentasi, yang perlu dilakukan ke depan adalah melakukan prioritas layanan publik mana yang akan diintegrasikan terlebih dahulu.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3